

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Analisa terhadap pemberitaan tentang opini WTP pada empat surat kabar di Sumatera Barat mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. *Framing* pemberitaan tentang opini WTP pada media cetak Sumatera Barat yang dianalisa menggunakan teknik analisis *framing* Murray Edelman mengungkapkan bahwa:
 - a. Kategorisasi yang dilakukan media terhadap pengertian dan arti pemberian opini WTP oleh BPK RI adalah salah. Terjadi miskategorisasi dalam pemberitaan tentang opini WTP di Sumatera Barat.
 - b. Teks berita tentang opini WTP menekankan pada dimensi atau sisi bahwa opini WTP berkaitan dengan pemerintahan yang unggul, bersih, suci dan luar biasa. Khalayak dibuat percaya bahwa dengan mendapatkan opini WTP maka pemerintahan tersebut unggul, bersih, suci dan luar biasa. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi para pejabat pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat Edelman, pilihan kategorisasi menentukan kepercayaan tertentu dan kebijakan tertentu. Skema klasifikasi merupakan pusat untuk melakukan manuver politik.

- c. Rubrikasi terkait pemberitaan tentang opini WTP sebagian besar tidak dikategorikan pada rubrik peristiwa tertentu seperti yang disampaikan Edelman. Berita yang pada *headline* dan rubrik khusus daerah merupakan klasifikasi yang ditemui peneliti dalam mengkonstruksi realitas.
2. Pemberitaan tentang opini WTP juga mengaburkan arti pemberian opini yang sebenarnya. Khalayak tidak mendapatkan informasi yang cukup dari media cetak tentang apa itu opini WTP, bahkan makna opini WTP itu sendiri telah dibatasi dalam dimensi atau sisi tertentu yang dibingkai oleh media. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar yang banyak diadopsi ke dalam kode etik jurnalisme yaitu akurasi dan akuntabilitas kepada publik.

6.2 Saran

Hasil penelitian pemberitaan media cetak tentang opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Media khususnya wartawan melaksanakan Kode Etik Jurnalisme (KEJ) yaitu pada pasal 1 wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, yaitu dengan:
 - a. Memberitakan tentang opini WTP sesuai dengan pengertian opini WTP itu sendiri.
 - b. Memberitakan opini WTP dengan akurat dengan menterjemahkan dan memberi makna tentang opini WTP sesuai dengan maksud opini WTP diberikan yaitu apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar

dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- c. Memberitakan opini WTP secara berimbang yaitu semua pihak mendapat kesempatan setara, termasuk konfirmasi kepada BPK tentang makna opini WTP agar tidak dimanfaatkan pihak lain untuk menggiring opini publik.
2. Humas BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dapat menjalin kerjasama yang baik dengan media cetak yang diundang pada saat penyerahan LHP dan lebih proaktif dalam memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mendapatkan informasi dari pihak BPK agar mendapatkan informasi yang berimbang dan Humas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat menginisiasi untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang terkait opini WTP
3. Kepada calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian serupa agar bisa memperluas cakupan penelitian atau memperdalam kajian dengan paradigma kritis sehingga dapat menemukan hal yang lebih kompleks dan terukur.

